

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Kinerja Perencanaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh menunjukkan perbedaan karakteristik kapasitas**

Secara umum, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki nilai perencanaan pajak dan retribusi daerah yang lebih tinggi dibandingkan Pemerintah Kota Payakumbuh selama periode penelitian. Namun, target perencanaan yang ditetapkan pada beberapa periode masih menunjukkan perbedaan dengan anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara perencanaan dan anggaran pada Pemerintah Kota Bukittinggi masih belum sepenuhnya konsisten. Sementara itu, Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan nilai perencanaan yang relatif lebih rendah dengan tingkat kesesuaian antara perencanaan dan anggaran yang pada beberapa periode cenderung lebih mendekati. Dengan demikian, kedua pemerintah daerah menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pajak daerah serta retribusi daerah.

##### **2. Kinerja Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan nilai anggaran yang lebih besar dibandingkan Kota Payakumbuh, namun belum sepenuhnya diikuti oleh capaian realisasi yang optimal.**

Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten menetapkan target anggaran pajak dan retribusi daerah lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh. Tingginya target tersebut terutama berasal dari sektor pajak hotel, restoran, hiburan, BPHTB, serta retribusi wisata dan perdagangan daerah. Namun demikian, tingginya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu direalisasikan secara optimal dalam pelaksanaannya.

Sebaliknya, Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan pola penganggaran dengan tingkat kesesuaian yang pada beberapa periode lebih mendekati realisasi penerimaan daerah yang dicapai. Hal tersebut terlihat dari beberapa tahun pengamatan di mana realisasi pendapatan daerah Kota Payakumbuh mampu mencapai bahkan melampaui target anggaran yang telah ditetapkan.

**3. Kinerja Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi secara nominal lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh, namun dari sisi efektivitas capaian target, Kota Payakumbuh relatif menunjukkan kinerja**

Secara total nominal realisasi pajak dan retribusi daerah, Kota Bukittinggi masih lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh, terutama didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Beberapa komponen unggulan Kota Bukittinggi meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, BPHTB, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.

Namun demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi secara keseluruhan belum mampu merealisasikan pendapatan daerah di atas target anggaran yang telah ditetapkan. Padahal anggaran pendapatan daerah merupakan target minimal yang seharusnya dapat dicapai bahkan dilampaui. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kota Bukittinggi memiliki potensi penerimaan daerah yang besar, optimalisasi pemungutan dan pencapaian target pendapatan daerah masih belum maksimal.

Sementara itu, Pemerintah Kota Payakumbuh relatif menunjukkan efektivitas realisasi yang lebih baik karena pada beberapa tahun mampu

merealisasikan pendapatan di atas target anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran Kota Payakumbuh cenderung lebih realistis serta didukung oleh pelaksanaan pemungutan yang lebih optimal.

**4. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki kapasitas potensi pendapatan daerah yang lebih besar, sedangkan Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah yang relatif lebih baik.**

Kota Bukittinggi unggul dari sisi besaran perencanaan, penganggaran, dan nominal realisasi pendapatan daerah yang didukung oleh sektor perdagangan dan pariwisata. Namun demikian, capaian realisasi yang belum mampu melampaui target anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan, terutama dalam tingkat pencapaian realisasi pendapatan terhadap target anggaran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Kota Payakumbuh menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan target anggaran dengan kemampuan realisasi pendapatan daerah, sehingga capaian realisasi relatif lebih efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi penerimaan, tetapi juga oleh tingkat kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan daerah.

**5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya menggunakan metode studi dokumentasi dengan data berupa dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025 sehingga analisis lebih berfokus pada aspek administratif dan kelembagaan pengelolaan pajak serta retribusi daerah.

Kedua, objek penelitian hanya terbatas pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah yang memiliki karakteristik dan potensi fiskal yang berbeda.

Ketiga, penelitian ini belum mempertimbangkan secara mendalam faktor sosial, ekonomi, dan politik daerah yang dapat memengaruhi kinerja perencanaan, penganggaran, dan realisasi pajak serta retribusi daerah.

### **5.3 Saran Penelitian**

#### **1. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh**

- a. Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, terutama dalam pencapaian realisasi pendapatan agar lebih optimal terhadap target anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pendapatan daerah dengan capaian realisasi pendapatan yang diperoleh pada periode sebelumnya.
- b. Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, disarankan untuk mempertahankan efektivitas realisasi pendapatan daerah yang telah mampu mencapai bahkan melampaui target anggaran pada beberapa periode. Pemerintah daerah juga perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan retribusi daerah, khususnya setelah implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang UU HKPD.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan pendekatan studi dokumentasi, tetapi juga melibatkan wawancara maupun observasi langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti Badan Keuangan Daerah, organisasi perangkat daerah pengelola retribusi, serta wajib pajak dan wajib retribusi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah.



- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan membandingkan lebih banyak pemerintah daerah yang memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengelolaan PAD.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat melihat perkembangan kinerja perencanaan, penganggaran, dan realisasi pajak serta retribusi daerah secara lebih komprehensif, khususnya setelah implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang UU HKPD.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan tidak hanya menganalisis pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pengelolaan PAD daerah, terutama setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

